

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak dasar bagi seluruh warga negara yang harus dipenuhi. Pendidikan menjadi hal yang sangat penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diperlukan untuk pembangunan secara berkelanjutan. Dengan adanya pendidikan setiap orang dapat memperbaiki nasibnya, mensejahterakan keluarganya, serta merubah kondisi sosial. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan dipandang bermutu diukur dari prestasi yang ditorehkan oleh para siswa. Untuk itu perlu dirancang suatu sistem pendidikan yang mampu menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang menyenangkan, merangsang dan menantang peserta didik untuk mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan bakat dan kemampuannya sehingga dapat tercipta lulusan yang berkualitas.

Proses pendidikan terdiri dari beberapa sistem yaitu input, proses dan output. Input dalam sistem pendidikan adalah peserta didik yang akan melaksanakan proses belajar dan bimbingan, proses merupakan kegiatan yang dilakukan dalam belajar, dan output adalah hasil dari kegiatan belajar. Dimana output dari sistem pendidikan diharapkan mampu mencetak generasi-generasi

yang cerdas serta sumber daya yang berkualitas sehingga mampu bersaing di era globalisasi. Salah satu lingkup dari program pendidikan adalah pendidikan formal maka dengan kaitan dalam hal inilah kemudian sekolah menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bahkan menjadi salah satu faktor penting dalam memajukan dan mencerdaskan bangsa melalui cerminan prestasi siswa yang memenuhi kriteria.

Menurut Suharsimi (2008) sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat besar sebagai agen perubahan (*agent of change*), sekaligus untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan agar siap memasuki era global yang penuh persaingan. Pemerintah serius dalam menangani bidang pendidikan sebab dengan pendidikan yang terbaik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas, unggul dan kompetitif. Oleh sebab itu, untuk menciptakan pendidikan yang maju dan berkualitas diperlukan manajemen yang baik.

Pendidikan yang bermutu serta sumber daya yang berkualitas merupakan salah satu tujuan dari sistem pendidikan, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 yaitu:

Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dasar tujuan pendidikan nasional yang telah tersirat dalam UU Sistem Pendidikan Nasional diatas jelas bahwa peningkatan mutu pendidikan harus betul-betul digalakkan dan tentunya untuk mewujudkannya memerlukan perencanaan yang matang serta proses yang panjang. Untuk hal tersebut memerlukan dukungan dari semua pihak terutama instansi pendidikan dan lingkungan keluarga peserta didik.

Salah satu indikator untuk menilai kualitas pendidikan adalah prestasi belajar yang dicapai oleh siswa. Menurut Syah (2010: 141), Prestasi belajar adalah tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Prestasi belajar ini digunakan untuk menilai hasil pembelajaran para siswa pada akhir jenjang pendidikan tertentu.

Pencapaian prestasi siswa yang diharapkan tentunya tidaklah mudah. Perlu pengorbanan yang besar dari pihak pemerintah, orang tua, masyarakat serta peserta didik itu sendiri. Salah satu usaha untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas adalah dengan pengalokasian sejumlah biaya-biaya untuk mendukung proses dan kegiatan belajar peserta didik sehingga prestasi siswa memenuhi standar keberhasilan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suhardan (2012: 66) bahwa mutu pendidikan tidak terjadi secara alamiah, ia terbentuk bila dikelola dengan manajemen yang baik. Direncanakan, digali sumber dayanya, dibiayai, diciptakan iklim organisasinya, diseleksi sumber daya manusianya, diawasi pelaksanaan kegiatannya, dikelola secara profesional, dan dipimpin secara efektif efisien.

Dalam hal peningkatan mutu pendidikan, Pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan pendidikan agar semua berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Salah satu upaya pemerintah dalam menuntaskan hal tersebut melalui program wajib belajar 12 tahun . program wajib belajar 12 tahun diselenggarakan dengan pengalokasian anggaran daerah dan bantuan pemerintah.

Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Salah satu anggaran daerah tersebut di alokasikan ke dalam pendidikan. Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Menurut Mendikbud anggaran Pendidikan di dalam APBD harus menyentuh angka 20 persen. Dengan realisasi anggaran pendidikan tersebut diharapkan dunia pendidikan nasional bisa berkembang lebih baik dalam rangka upaya peningkatan mutu pendidikan nasional. Alokasi anggaran memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan kualitas pendidikan, hal tersebut dapat terlihat dari besarnya biaya pendidikan yang ditetapkan setiap tahunnya di

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga dapat dikatakan kuatnya keadaan ekonomi suatu negara akan berpengaruh terhadap pengalokasian sumber biaya pendidikan maupun terhadap kebijakan yang akan diambil dan dilaksanakan oleh suatu negara dalam bidang pendidikannya.

Supriadi (2003:76) menyatakan bahwa biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Biaya pendidikan diperlukan untuk memfasilitasi pelaksanaan kebijakan program sekolah, terlaksananya aktivitas sekolah (intra maupun ekstra), dan dapat mengembangkan sekolah sebagai lembaga yang bermutu. Biaya pendidikan diperlukan juga untuk memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan program sekolah, terlaksananya aktivitas sekolah baik intra maupun ekstra dan dapat mengembangkan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang bermutu. Dalam hal ini jelas bahwa biaya pendidikan sangat mempengaruhi pendidikan disekolah, khususnya kegiatan belajar mengajar.

Kemampuan dan kecerdasan sesungguhnya merupakan modal dasar untuk belajar, namun tidak demikian bagi anak yang kurang mampu ekonominya, terkadang ada anak yang harusnya berhasil dalam belajarnya tetapi terbengkalai karena tidak adanya biaya dan fasilitas yang mendukung proses serta kegiatan belajarnya. Contohnya anak dalam belajarnya akan sangat memerlukan sarana penunjang belajarnya, yang terkadang harganya mahal. Apabila kebutuhannya tidak terpenuhi maka menjadi penghambat bagi anak dalam pembelajarannya. Sarana bacaan, fasilitas belajar yang terbatas dan kadang tak terpenuhinya

kebutuhan pendidikan mempengaruhi siswa sehingga kurang memperhatikan pelajaran dengan baik, akhirnya tertinggal dalam hal prestasi.

Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa diperlukan sarana dan sumber belajar yang memadai. Semua itu tidak terlepas dari pembiayaan, karena buku-buku dan peralatan penunjang proses pembelajaran harus dibeli. Biaya pendidikan mutlak diperlukan dalam peningkatan kualitas siswa yang tercermin dalam hasil prestasi belajar siswa. Terbukti banyak anak usia sekolah dari keluarga yang kurang mampu ekonominya terpaksa putus sekolah karena tak sanggup membiayai kebutuhan sekolah.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menggulirkan program bantuan terhadap pendidikan. Bantuan pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah. Contoh bantuan pemerintah dalam bidang pendidikan yaitu dengan adanya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dengan adanya bantuan pemerintah tersebut diharapkan keperluan pribadi siswa terpenuhi dan prestasi belajar akan meningkat. Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa dengan adanya anggaran pendidikan dan bantuan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan prestasi siswa.

Sumatera Utara merupakan provinsi dengan alokasi anggaran pendidikan yang kurang memuaskan. Berdasarkan pada data neraca pendidikan daerah yang disusun oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan, persentasi anggaran

pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum mencapai 20%. Tercatat dalam neraca pendidikan pada tahun 2018 alokasi anggaran pendidikan di Sumatera Utara hanya mencapai 12,94% sedangkan di Sumatera Barat sudah mencapai 21,70%. Alokasi anggaran yang belum maksimal ini memungkinkan adanya dampak terhadap hasil prestasi belajar siswa. Dalam hal ini prestasi belajar siswa dapat dilihat dari hasil Ujian Nasional. Menurut neraca pendidikan hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas di Sumatera Utara relatif rendah, dimana hasil Ujian Nasional IPA provinsi Sumatera Utara menduduki peringkat 21 dari 34 provinsi di Indonesia sedangkan hasil Ujian Nasional IPS menduduki peringkat 19 dari 34 provinsi di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan dan Bantuan Pemerintah Terhadap Prestasi Belajar Siswa Sekolah Menengah Atas (studi Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat di simpulkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran pendidikan di Sumatera Utara relatif kecil.
2. Bantuan pemerintah dalam bidang pendidikan di Sumatera Utara kurang merata.
3. Prestasi siswa Sekolah Menengah Atas di Sumatera Utara kurang memuaskan

1.3 Pembatasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini lebih terarah dan jelas, maka perlu adanya batasan masalah demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Sehubungan dengan itu peneliti membatasi hanya pada pengaruh Alokasi Anggaran Daerah dan Bantuan Pemerintahan Terhadap Prestasi Belajar Siswa Sekolah Menengah Atas melalui Kinerja Berbasis *Balanced Scorecard* (studi di Sumatera Utara).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Alokasi Anggaran Pendidikan berpengaruh terhadap Prestasi Belajar Siswa?
2. Apakah Bantuan Pemerintah berpengaruh terhadap Prestasi Belajar Siswa?
3. Apakah Alokasi Anggaran Pendidikan dan Bantuan Pemerintah berpengaruh terhadap Prestasi Belajar Siswa?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan terhadap Prestasi Belajar Siswa.
2. Untuk mengetahui pengaruh Bantuan Pemerintah terhadap Prestasi Belajar Siswa.

3. Untuk mengetahui pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan dan Bantuan Pemerintah terhadap Prestasi Belajar Siswa.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan penulis tentang pengaruh alokasi anggaran daerah dan bantuan pemerintah terhadap prestasi belajar siswa. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya sebagai bahan masukan bagi peneliti lain dalam bidang yang sama di masa yang akan datang.

2. Bagi akademis

Hasil penelitian ini bagi para akademis adalah sebagai bahan informasi dan masukan bagi peneliti yang berminat pada permasalahan yang sama.

3. Bagi Sekolah Menengah Atas

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi sekolah Sekolah Menengah Atas dalam merumuskan kebijakan alokasi anggaran daerah dan bantuan pemerintah yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa.